

Jurnal Etika dan Pemilu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terbit rutin sejak tahun 2015, terdaftar di lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dengan Internasional Standar Serial Number (p-ISSN) 2460-0911 dan dalam proses pendaftaran akreditasi di Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. Dalam Rangka Penerbitan Jurnal edisi ketiga belas (Vol 4 nomor 1 Juni 2018), Redaksi menerbitkan Undangan Penulisan Karya Ilmiah Terbuka (Call for Papers), dengan topik utama Modus Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Tingkat Lokal.



### CALL FOR PAPERS 2018 "JURNAL ETIKA & PEMILU"

Jurnal "ETIKA & PEMILU" Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terbit rutin sejak Tahun 2015, terdaftar di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dengan *International Standard Serial Number* (p-ISSN) 2460-0911, dan dalam proses pendaftaran untuk memperoleh akreditasi di Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.

Dalam rangka penerbitan Jurnal edisi ketigabelas (Volume 4, Nomor 1, Juni 2018), redaksi menerbitkan "Undangan Penulisan Karya Ilmiah Terbuka (*Call for Papers*)", dengan topik utama "Modus Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Di Tingkat Lokal". Adapun topik pilihan yaitu :

1. Tipologi Modus Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu
2. Pencegahan Terhadap Modus Pelanggaran Kode Etik
3. Menakar Efektivitas Terhadap Penanganan Modus Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

#### Dasar penulisan dan pilihan topik:

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) didirikan sejak 12 Juni 2012. UU Nomor 7 Tahun 2017 menjelaskan bahwa DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota. Pemeriksaan terhadap perkara aduan dan/laporan yang dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materil dilakukan melalui sidang. Sejak Tahun 2012 hingga 18 April 2018, terdapat sebanyak 1003 perkara yang dinyatakan memenuhi syarat formil dan materil untuk kemudian disidangkan. Dari total 1003 perkara yang dinyatakan laik sidang oleh DKPP, sebanyak 967 perkara telah disidang dan diputus perkaranya. Untuk sisanya sebanyak 36 perkara masih proses sidang. Adapun jumlah total Teradu yang telah diputus per 18 April 2018 sebanyak 3831 orang.

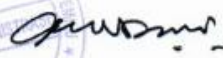
Terhadap perkara yang telah di putus, DKPP menemukan beberapa modus pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Modus-modus pelanggaran kode etik, diantaranya penyuapan (*Bribery of Officials*), pelanggaran hukum (*Break a law*), perlakuan tidak adil (*unequal treatment*), ketidakcermatan (*Sloppy Work of Eletion Process*), acuh/abai terhadap kesalahan (*absence of fault remedies*), manipulasi suara (*vote manipulation*), dan benturan kepentingan (*conflict of interest*).

Selanjutnya, berdasarkan data aduan/atau pengaduan yang diterima oleh DKPP, selama tahun 2017 hingga 2018, Papua menduduki peringkat pertama dengan jumlah aduan sebanyak 41 perkara. Selanjutnya disusul wilayah Sumatra Utara sebanyak 31 perkara. Kemudian, peringkat ketiga ada wilayah Jawa Timur dan Jawa Barat yang masing-masing berjumlah 21 pengaduan. Peringkat keempat Sumatera Selatan dengan total aduan sebanyak 17 perkara dan yang kelima yakni Sulawesi Tenggara dengan total aduan 13 perkara.

Selamat menulis dan terima kasih atas sumbangsuhnya untuk Pemilu Indonesia yang lebih baik.

Jakarta, 28 Mei 2017

PIMPINAN REDAKSI/  
KEPALA BIRO ADMINISTRASI DKPP,

  
BERNAD DERMAWAN SUTRISNO  
NIP. 197410051993011001

## LAMPIRAN

### Ketentuan Penulisan:

1. Artikel ilmiah yang diterima redaksi Jurnal Etika dan Pemilu merupakan karya sendiri, bukan saduran, ataupun plagiasi.
  2. Artikel ditulis maksimal 20 halaman, font Corbel, ukuran 12, spasi 1,5 ukuran kertas A4; page setup (top 4, left 4, bottom 3, right 3)
  3. Sistematika penulisan memuat: judul artikel, penulis dan afiliasi institusi, abstrak dalam bahasa Indonesia dan Inggris, pendahuluan, metode bila artikel merupakan laporan penelitian, analisis atau hasil-hasil penelitian, penutup terdiri atas simpulan dan saran, daftar pustaka catatan kaki, dan biodata penulis.
  4. Untuk artikel yang dimuat, memperoleh hak honorarium bersumber dari keuangan negara (APBN) DIPA DKPP.
  5. Hal-hal yang belum jelas dapat dikonfirmasi kepada redaksi dengan alamat e-mail: [redaksi@dkpp.go.id](mailto:redaksi@dkpp.go.id)
  6. Batas akhir pengiriman naskah pada 22 Juni 2018
- 

### Contoh penulisan Catatan Kaki

#### ♦ Buku

<sup>1</sup>Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi: Perspektif Baru tentang Rule of Law and Rule of Ethics* dan *Constitutional Law and Constitutional Ethics*. Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal 132.

<sup>2</sup>Teguh Prasetyo, *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum*. Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hal 134.

#### ♦ Jurnal, majalah, dan surat kabar

<sup>3</sup>Yudi Latif, "Optimisme dalam Krisis" *Gatra*, 10-16 September 2016

<sup>4</sup>Kompas, 13 Januari 2016, hal. 7

#### ♦ Daftar Pustaka

Asshiddiqie, Jimly. 2014. *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi: Perspektif Baru tentang 'Rule of Law and Rule of Ethics' dan 'Constitutional Law and Constitutional Ethics'*. Jakarta: Sinar Grafika.

Prasetyo, Teguh, 2015. *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum* Jakarta: Rajawali Pers.

#### ♦ Jurnal, majalah, dan surat kabar

Sitorus, Monang, Oktober 2015, "Memahami Perilaku Aparatur Sipil Negara Sebagai Penyelenggara Pemilu". Volume 1, No. 3, <http://dkpp.go.id/library/jurnal>, 25 Desember 2015.

Latif, Yudi. 2016. "Optimisme dalam Krisis". *Gatra XXI*

Hasani, Ismail. 2016. "Episode Peradilan Pilkada." *Kompas*, 13 Januari 2016.

---

### Alamat Redaksi Jurnal Etika & Pemilu

Sekretariat Biro Administrasi DKPP, Jalan M.H. Thamrin No. 14 Jakarta Pusat

Telepon: +62 21 3192245, Fax. +62 21 3192245

Website: [www.dkpp.go.id](http://www.dkpp.go.id). E-mail: [redaksi@dkpp.go.id](mailto:redaksi@dkpp.go.id) / [jurnaldkpp@gmail.com](mailto:jurnaldkpp@gmail.com)

---